

- [Tribunners](#)

»

- [Politik](#)

Tribunners / Citizen Journalism

Demokrasi (Kabinet) Kekeluargaan

Rabu, 23 Oktober 2019 19:19 WIB



ist

Dr Osbin Samosir, M.Si

***) Oleh: Dr Osbin Samosir, M.Si**

“Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mentjari [demokrasi](#), hendaknja bukan démokrasi Barat, tetapi permusjawaratan jang memberi hidup

--Soekarno dalam Rapat BPUPKI 1 Juni 1945--

KRITIK terbesar para Bapak Pendiri Bangsa (Founding Fathers) ketika merumuskan fondasi dasar negara bangsa Indonesia yang hendak dibangun adalah menolak seluruh format [demokrasi](#) yang dibangun oleh negara Barat dan Amerika.

Demokrasi yang khas Indonesia berbasis [kekeluargaan](#). Semangat itu sedang bertumbuh ketika melihat [Prabowo Subianto](#) Ketua Umum Partai Gerindra dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid II Rabu 23 Oktober 2019.

Dalam dua kali periode Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat yakni Tahun 2014 dan Tahun 2019, kedua figur itu bertarung sangat ketat (face to face) bahkan meninggalkan emosi dan luka batin bagi para pihak pendukung kedua kubu.

Kehadiran Prabowo dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid II semakin menegaskan bahwa sosok demokrasi yang cocok untuk Indonesia bukanlah sosok demokrasi modern.

Baca: [5 Mantan Menteri Jokowi yang Pamit Mundur, Susi Pudjiastuti Beri Pesan Khusus ke Edhy Prabowo](#)

Demokrasi di Eropa Barat dan Amerika sebagai asal muasal [demokrasi](#) menempatkan partai dan calon presiden dari kubu yang kalah di luar pemerintahan sebagai oposan.

Pihak oposisi akan selalu mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkuasa (the ruling party).

Bukan hanya sekedar mengkritik kebijakan pemerintah, kalangan oposisi bahkan akan memberi solusi alternatif atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang dianggap tidak memihak kepentingan masyarakat luas. Hasil kerja kedua kubu dinilai oleh masyarakat pemilih di Pemilihan Umum berikutnya.

Jika rakyat merasa kecewa dengan pemerintah, maka pemilih akan menghukumnya dengan memenangkan partai oposisi, dan sebaliknya.

Format ini berjalan di Amerika dengan dua partai dominan: Partai Demokrat versus Partai Republik, di Inggris dengan Partai Buruh dan Partai Konservatif.

Baca: [Tim ilmuwan Inggris dan AS sedang mencari berbagai tanda kelahiran kanker](#)

Ciri khas [demokrasi](#) di Eropah dan Amerika, bahwa hanya ada dua partai yang dominan, partai-partai lain mengambil posisi di salah satu partai dimaksud. Ciri lain liberalisme [demokrasi](#) awal adalah lahirnya ego individualisme, sehingga kepunahan si lemah dan si miskin adalah pupuk bagi liberalisme.

Demokrasi Kekeluargaan Indonesia

Demokrasi yang dianut oleh Indonesia

bukanlah [demokrasi](#) sebagaimana [demokrasi](#) yang lahir dan bertumbuh di Barat dan Amerika yang menjadi contoh [demokrasi](#) modern.

Para founding fathers Indonesia bersepakat menolak [demokrasi](#) dengan prinsip liberalisme dari Barat karena mengandalkan penghormatan pada kekuatan dan keunggulan individual, tidak memberi tempat pada kohesi social yang mengutamakan kebersamaan dan harmoni.

Soekarno memberi contoh buruknya Demokrasi Barat: „*Wakil kaum buruh jang mempunjai hak politiek itu, didalam Parlemen dapat menjatuhkan minister. Ia seperti Radja! Tetapi didalam dia punja tempat bekerdja, didalam paberik, — sekarang ia menjatuhkan minister, bésok dia dapat dilémpar keluar kedjalan raja, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa*”.

Demokrasi yang khas Indonesia oleh para founding fathers adalah [demokrasi](#) yang ciri dasarnya [kekeluargaan](#).

Soepomo dalam Rapat BPUPKI 31 Mei 1945 di Gedung Chuuoo Sanga-In menjelaskan, “ ... *prinsip persatuan antara pimpinan 'dan rakjat dan prinsip persatuan dalam negara seluruhnja tjotjok dengan aliran pikiran ketimuran. ... Dasar persatuan dan [kekeluargaan](#) ini sangat sesuai pula dengan tjorak masjarakat Indonesia.*” Bagi Supomo, corak asli Demokrasi Indonesia adalah [kekeluargaan](#) yakni negara integralistik.

Negara [kekeluargaan](#) mengutamakan harmoni, saling menghargai, meminimalisir perbedaan pendapat, tidak perlu saling mengkritik yang menyakitkan apalagi sampai perpecahan.

Persis seperti sebuah keluarga yang mana semua anggota keluarga saling menjaga harmoni. Karena itulah Soekarno merumuskan Pancasila pada Rapat BPUPKI 1 Juni dengan semangat [demokrasi kekeluargaan](#) khas Indonesia: “Kita hendak mendirikan suatu negara „semua buat semua”. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan jang kaya, — tetapi „semua buat semua”.

Maka sejarah Indonesia pun dibangun tidak dengan adanya oposisi seperti praktek [demokrasi](#) di negara-negara Barat dan Amerika.

Karena postur [demokrasi](#) kita dibangun sebagai sebuah keluarga, maka partai yang kalah pun sangat layak untuk masuk ke dalam pemerintahan kubu yang menang.

Gambaran itulah yang ditampilkan dalam pelantikan [Prabowo Subianto](#) sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dalam Kabinet Indonesia Kerja Joko Widodo. Apakah langkah yang diambil oleh Prabowo akan merusak pengertian dan tatanan [demokrasi](#)?

Bagi Prabowo, masuk dalam kabinet adalah kesempatan untuk memberitahu ke public bahwa kepentingan membangun dan berbuat untuk kemajuan bangsa jauh lebih memberi nilai dan makna dibandingkan terus menerus memelihara rasa perasaan terluka anak-anak bangsa kedua kubu yang bisa semakin membelah persatuan dan kesatuan.

Bagi penganut [demokrasi](#) modern seperti yang bertumbuh di Eropah dan Amerika, sikap Prabowo akan dinilai mengkhianati nilai-nilai [demokrasi](#) yang ada di dalamnya ada oposisi.

Lalu bagaimana dengan masa depan [demokrasi](#) Indonesia?

Sampai saat ini, kita masih sedang belajar berdemokrasi karena Indonesia memang tidak punya sejarah dan tradisi [demokrasi](#). Postur [demokrasi](#) yang khas Indonesia masih dalam pencarian.***

**) Pengajar Ilmu Politik FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta*